

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Volume II. No.2 Januari-Desember 2014

Kontekstualisasi Politik Islam dalam Kebinekaan di Indonesia

Sekilas Tentang Teori-Teori Realisme Amerika

Membangun Partisipasi Pemilih
untuk Menggunakan Hak Suaranya

Konfigurasi Politik Hukum Perdata BW
dan Politik Hukum Islam di Indonesia

Politik Hukum Penegakan Keadilan Melalui
Bantuan Hukum di Indonesia

Syarat dan Prosedur Poligami
(Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Fiqh Islam serta
Realitasnya di Masyarakat)

Pergumulan antara Kelompok Liberal dan Konservatif
dalam Politik Hukum Islam di Tunisia

Penelitian Hukum Islam dengan Pendekatan Sejarah

Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an
(Suatu Kajian Tafsir Tematik)

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI)
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Pimpinan Umum

Saidurrahman

Ketua Penyunting

Fatimah

Penyunting Pelaksana

Syafruddin Syam

Penyunting Ahli

Nawir Yuslem (IAIN Sumatera Utara)

Muhammad Iqbal (IAIN Sumatera Utara)

Ansari (IAIN Sumatera Utara)

Ibrahim Siregar (STAIN Padangsidimpuan)

Sekretariat:

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan

e-mail : Syafanikiya@gmail.com.

DAFTAR ISI

Muhammad Habibi Siregar

Kontekstualisasi Politik Islam dalam Kebinekaan di Indonesia [1-18]

Abd. Muksin

Sekilas Tentang Teori-Teori Realime Amerika [19-33]

Khalid

Membangun Partisipasi Pemilih untuk Menggunakan Hak Suaranya dalam Pemilu [35-44]

Mhd. Yadi Harahap

Konfigurasi Politik Hukum Perdata BW dan Politik Hukum Islam di Indonesia [45-59]

Budi Sastra Panjaitan

Politik Hukum Penegakan Keadilan Melalui Bantuan Hukum di Indonesia [61-77]

Ramadhan Syahmedi Siregar

Syarat dan Prosedur Poligami (Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Fiqh Islam serta Realitasnya di Masyarakat) [79-93]

Budi Juliandi

Pergumulan antara Kelompok Liberal dan Konservatif dalam Politik Hukum Islam di Tunisia [95-117]

Sukiati

Penelitian Hukum Islam dengan Pendekatan Sejarah [119-131]

Mahyuddin

Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik) [133-147]

POLITIK HUKUM PENEGAKAN KEADILAN MELALUI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Budi Sastra Panjaitan

(Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara)

ABSTRAK

Legal aid is one of the processes in the enforcement of human rights , especially for the citizens of the proletarian state . Because it is a form of legal aid to the poor state responsibility as perwujudan of access to justice. Legal aid is set in UUBH include legal aid for civil disputes, criminal disputes , and disputes the State administration , both litigation and non-litigation. In the process of legal aid , Legal Aid run power , assist , represent , defend , and / or other legal action for and on behalf of the law and the interests of the Legal Aid Recipients.

Bantuan hukum merupakan salah satu proses dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi warga negara proletar. Karena itu bantuan hukum merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyat miskin sebagai perwujudan terhadap akses keadilan. Bantuan hukum yang diatur dalam UUBH meliputi bantuan hukum untuk sengketa keperdataan, sengketa pidana, dan sengketa tata usaha Negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Di dalam proses bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum.

Kata Kunci: Keadilan, hukum, bantuan hukum.

A. Pendahuluan

Lahirnya UU Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH) secara serta merta menjadi rujukan setiap komponen dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. UUBH disahkan dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bantuan hukum merupakan hal yang penting harus dilaksanakan bagi segenap rakyat Indonesia dengan tujuan membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah hukum.

Bantuan hukum juga dapat membantu fakir miskin memperoleh pengetahuan hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi rakyat.

Lahirnya UUBH secara serta merta menjadi rujukan setiap komponen dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. UUBH disahkan dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Bantuan Hukum Sebagai Amanat Konstitusi

Dalam negara demokrasi modern terdapat asumsi pembentukan negara berdasarkan teori perjanjian masyarakat (*social contract*). Agar perdamaian terjadi, antara manusia mengadakan suatu perjanjian untuk membentuk negara.¹ Tujuannya adalah agar setiap manusia dalam negara yang diperjanjikan dapat bekerja untuk memiliki sesuatu dan tidak selalu terancam jiwanya..²

Dalam teori *social contract*, kedaulatan dalam penyelenggaraan negara berasal dari rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya negara harus melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat. Menurut teori *social contract*, fungsi negara untuk melindungi hak-hak warga negara sehingga tidak terjadi pelanggaran antara sesama warga negara dan tujuan pembentukan negara adalah untuk menegakkan ketertiban agar tidak terjadi manusia sebagai "*homo homini lupus*".³

Dari perspektif perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, dapat disimpulkan "dalam keadaan alam bebas ada kekacauan, maka orang memerlukan jaminan atas keselamatan jiwa miliknya, mereka lalu menyelenggarakan perjanjian masyarakat (*social contract*)".⁴

"Hal pokok dari perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga karena itu semuanya dapat bersatu."⁵

Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat, berarti setiap orang telah melepaskan dan menyerahkan haknya kepada masyarakat, sebagai akibat dari diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah:⁶

¹ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 76.

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 99.

³ M. Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah Disampaikan Pada "Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)". Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009, h. 3.

⁴ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara...*, h. 79.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soehino, *Ilmu Negara...*, h. 120.

1. Terciptanya kemauan umum atau *volonte generale*, yaitu kesatuan daripada kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi, inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan.
2. Terbentuknya masyarakat atau *gemeinschaft*, yaitu kesatuan daripada orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum, yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan yang tertinggi tadi, atau kedaulatan, disebut kedaulatan rakyat.

Dari perspektif yang dikemukakan di atas, dalam *social contract* kecenderungan untuk bernegara tumbuh dengan sendirinya guna memenuhi kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi secara sendiri-sendiri oleh warga negara, khususnya dalam bidang keamanan dan perlindungan terhadap serangan pihak luar. Dengan perjanjian masyarakat telah diciptakan negara, ini berarti telah terjadi suatu peralihan dari keadaan alam bebas ke keadaan bernegara.⁷

Konsekwensi yang dilahirkan dari *social contract* adalah apabila kemudian dalam menjalankan tugasnya pemerintah bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah dapat dinazulkan (dijatuhkan) oleh rakyat.⁸

Sebagai sebuah “produk”, hukum dibuat dan dibebankan kepada manusia, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum dibutuhkan karena ia memiliki sekalian kelengkapan, legitimasi dan kekuatan untuk memaksakan tatanan yang dikehendakinya.⁹ Hukum yang dibuat membatasi kehidupan manusia. Pembatasan tersebut disebabkan karena kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.¹⁰ Hukum harus dipatuhi agar kehidupan sosial berjalan tertip.¹¹

Dalam konteks *social contract*, perjanjian masyarakat merupakan perbuatan manusia yang selanjutnya dibebankan kepada manusia yang membuatnya dengan tujuan lahir kesepakatan bersama untuk ketertiban dan kedamaian dalam sebuah organisasi kenegaraan.

“Jadi dengan perjanjian masyarakat itu, terciptalah “negara”, yang berarti telah tercipta (terjadi) suatu peralihan dari keadaan alam bebas ke keadaan bernegara. Peralihan ini telah mengganti “naluri manusia” menjadi “keadilan” dan “kesusilaan”. Dalam arti bahwa kebebasan tanpa batas atau kebebasan alamiah dari naluri dasar manusia berganti menjadi “kemerdekaan yang dibatasi dengan kemauan umum (*volonte generale*)” yang diwakili oleh negara”.¹²

⁷ *Ibid*.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 67.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008), h. 9.

¹⁰ Edy Daminan, *The Rule of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1970), h. 87.

¹¹ Petrus CKL. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*, (Bogor : Insan Merdeka, 2013), h. 3.

¹² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara....*, h. 80.

Segala tradisi yang diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara yang terlahir dari *social contract* merupakan norma hukum dasar dalam bernegara. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern, *social contract* merupakan hukum dasar yang mengatur bagaimana negara dan aparturnya menjalankan fungsi negara.

Untuk menegakkan hukum dasar dari kebijakan *social contract* dan guna menjalankan fungsi negara, dibutuhkan instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara. Instrumen dan institusi hukum inilah yang kemudian menjadi ciri dari negara hukum (*rechts staat*), dimana kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum itu sendiri.¹³

Baik raja atau penguasa maupun rakyat, bahkan negara tunduk kepada hukum,¹⁴ penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang.¹⁵ Dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai, sedangkan kedamaian itu sendiri adalah merupakan keserasian antar ketertiban (*order*) dengan ketentraman.¹⁶

Dalam sebuah negara, fungsi hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Fungsi kritis hukum, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya.

Hukum dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), terutama untuk menegakkan keadilan yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda.¹⁸ Hukum yang dipisahkan dari keadilan merupakan hukum positif.¹⁹ Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*).²⁰

Melepaskan hukum dari keadilan cukuplah sulit karena secara politis akan terkait dengan bagaimana menciptakan hukum sebagai sebuah keadilan, sementara itu konsep

¹³ Soehino, *Ilmu Negara*.., h. 156.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, , 1987), h. 65

¹⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 51.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), h. 15.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, (New York: Tp 1961), h. 5.

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2010), h. 77.

keadilan bagi semua orang tidaklah sama.²¹ Pemahaman terhadap keadilan secara konkret dapat dilihat dari pemahaman terhadap hukum.²² Betapapun bagus dan efisiensinya hukum, tetapi jika ia tidak adil, maka hukum itu harus diganti.²³ Jika keadilan dimaknai sebagai sebuah kebutuhan maka akan tergambar kebahagiaan semua orang menunjukkan keadilan bagi semuanya. Karena itu keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.²⁴

Dasar pijak pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,²⁵ guna mewujudkan keadilan perlu ditelaah pendapat Lawrence M. Friedman mengenai 3 komponen penting dalam sistem hukum (*legal system*) yaitu: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.²⁶

Ketiga hal tersebut merupakan komponen pembentuk sistem hukum (*legal system*) yang dikehendaki masyarakat,²⁷ dan ke tiga sistem yang disampaikan Friedman juga sekaligus sebagai pembentuk keadilan.²⁸ Antara hukum dengan keadilan tidaklah sama, namun salah satu piranti dalam mewujudkan keadilan adalah hukum itu sendiri.

Rule of the law muncul sebagai sebuah teori hukum bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dengan atribut kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai konsekwensi lahirnya *rule of the law*, semua perbuatan negara diukur melalui hukum, baik dalam sisi substansi maupun prosedur, hukum yang dibuat tidak untuk kepentingan penguasa, tetapi lebih dari itu untuk melindungi segenap lapisan masyarakat, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat (*law is tool of social*

²¹ Dalam hal ini kebutuhan dan keinginan setiap orang sangatlah berbeda, karenanya rasa adil juga berbeda bagi setiap orang, seperti misalnya keadilan yang diinginkan Advokat dari pihak Penggugat sangatlah berbeda dengan keadilan yang diinginkan Advokat dari pihak Tergugat sekalipun sengketa yang ditangani sama, akibatnya kemudian rasa keadilan masing-masing pihak juga berbeda, untuk itu kemudian dibutuhkan Hakim sebagai pemutus sengketa guna mewujudkan keadilan yang berbeda-beda tersebut, itupun kemudian masih terdapat peluang hukum yang sama untuk mewujudkan rasa keadilan yang berbeda-beda tersebut melalui lembaga banding, kasasi dan peninjauan kembali.

²² J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), h. 33.

²³ *Ibid*

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law...*, h. 5-6.

²⁵ M. Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional...*, h. 3.

²⁶ L.M.Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975), h.11.

²⁷ *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hal. 1

²⁸ Untuk menggambarkan kinerja *legal system* dapat dilihat apabila komponen struktur hukum (*legal structure*) diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya (*legal substance*) adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Lihat *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, h. 1, lihat juga L.M.Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975), hal.11 yang menyatakan "Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya"

engineering).²⁹ Perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu pilar utama dari demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the rule of law*.³⁰

Setiap orang memiliki hak asasi manusia, bukan berarti yang bersangkutan bebas menjalankan kehendaknya, setiap orang akan berhadapan dengan hak asasi manusia lainnya, karena itu dalam menjalankan hak asasi manusia juga berarti berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Hak asasi manusia dibatasi oleh ketertiban, dan ketertiban juga dibatasi oleh kebebasan.

"HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti "Hak Asasi Manusia" dan HAM dalam arti "Hak Asasi Masyarakat". Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan."³¹

Sekalipun dalam negara konstitusi *rule of the law* merupakan bagian yang terpisahkan, namun kenyataannya tidaklah demikian pada perwujudan keadilan, khusus bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, baik karena ketidakmampuan maupun karena ketidakmampuan biaya, akibatnya keadilan tetap menjadi barang mewah bagi masyarakat kelas proletar yang senantiasa termarjinalkan.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkan hak yang sama bagi setiap orang dihadapan hukum, karena itu lahir kemudian teori hukum persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam teori ini semua orang dari yang kaya sampai yang miskin dari yang bermartabat sampai dengan yang tidak bermartabat, dan dari yang lengkap dan fisiknya maupun yang tidak lengkap fisik dan fisiknya memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa ada kecuali untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu terpenting dalam hukum modern,³² dan asas ini merupakan prasyarat sebuah hukum.³³ Persamaan dihadapan hukum menjadi salah satu doktrin hukum dalam hukum *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara.

Persamaan di hadapan hukum harus dimaknai secara dinamis dan tidak secara statis.³⁴ Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum maka harus dimaknai

²⁹ Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Rineka Cipta, 2010), h. 11.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pelayan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), h. 10.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 57.

³² Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1998), h. 62.

³³ Karni Ilyas, *Catatan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Karyawan Forum, 1996), h. 15.

³⁴ Jika persamaan dihadapan hukum dimaknai secara statis, dengan sendirinya akan menimbulkan ketidakadilan yang dilahirkan dari perbuatan menodai persamaan dihadapan hukum, akibatnya secara struktur telah terjadi perbuatan yang mengingkari *equality before the law*

dengan perbuatan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada para pihak yang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama oleh hakim (*audi et alteram partem*). Jika hakim sudah bertindak tidak melakukan persamaan perlakuan maka badan peradilan sebagai benteng terakhir tertip hukum (*the last bastion of legal order*) tidak akan terwujud.

Persamaan di hadapan hukum yang dimaknai secara dinamis dapat memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang para pihak yang bersengketa sehingga kebenaran dan keadilan (*truth and justice*) serta hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud.

Semenjak UUD 1945 diberlakukan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran yang kuat untuk menjadikan hukum sebagai pilihan yang ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan Indonesia sebagai negara³⁵ hukum memberikan makna "hukum di negara hukum harus diberi peranan secara mendasar, yakni sebagai titik sentral seluruh kehidupan orang perseorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara".³⁶

Pilihan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum bukanlah pilihan tanpa dasar, bukan negara lain yang ingin dibangun oleh bangsa ini melainkan sebuah negara hukum.³⁷ Oleh banyak pihak hukum dianggap sebagai alat dalam melakukan perubahan, karenanya hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³⁸

"Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atau perwujudan kaidah hukum tersebut dalam praktik hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik".³⁹

Pilihan negara hukum secara jelas disebutkan di dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).". Pilihan kepada hukum menunjukkan bahwa negara Indonesia yang akan dibangun adalah negara yang penuh dengan keteraturan. Keteraturan tersebut dapat terjadi karena hukum merupakan suatu keteraturan (*order*).⁴⁰

³⁵ Secara sederhana, negara dapat diberikan pengertian sebagai kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama. Lebih lanjut lihat I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara...*, h. 4.

³⁶ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Jakarta: ELSAM, 1997), h. 5.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir...*, h. 21.

³⁸ H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), h. 14.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 1.

Hukum dianggap sebagai perangkat paling baik dan paling memungkinkan untuk menghentikan perselisihan di dalam kehidupan sosial.⁴¹

Untuk mewujudkan keteraturan, maka harus ada unsur yang berlaku secara umum bagi negara hukum, diantaranya adalah sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Salah satu jaminan yang harus terdapat dalam negara hukum adalah adanya kesamaan derajat atau kedudukan di dalam hukum dan keadilan serta berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

Frans Magnis Suseno menyebut empat syarat penting negara hukum yang meliputi:⁴²

1. Adanya asas legalitas yang artinya bahwa pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.
2. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.
3. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
4. Adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Akses keadilan dilandasi oleh semangat untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan hanya pada saat menghadapi masalah di lembaga peradilan, tetapi juga meliputi haknya untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan itu sendiri. Untuk mewujudkan terselenggaranya negara hukum, negara perlu campur tangan, karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Tanpa ada campur tangan negara dapat dipastikan keadilan tidak akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Campur tangan negara dalam mewujudkan keadilan menunjukkan paradigma negara hukum yang dibangun berbanding lurus dengan pewujutan keadilan, paradigma ini merupakan implikasi dari pewujutan negara hukum yang demokratis, dimana setiap aktivitas kehidupan bernegara merupakan perintah dari hukum itu sendiri yang di dasari oleh konstitusi.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengilhami persamaan hak dihadapan hukum bagi segenap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Guna mengimplementasikan negara hukum dan melindungi segenap lapisan masyarakat, bantuan hukum merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, dengan kata lain persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Kebutuhan terhadap hadirnya UUBH sejalan dengan tujuan nasional yang tetap mengedepankan hukum dalam setiap aktifitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penetras

⁴¹ Petrus CKL. Bello, *Ideologi Hukum...*, h. 1.

⁴² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 301.

hukum dalam kehidupan bermasyarakat semakin meningkat.⁴³ UUBH dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan UUBH yang menyatakan sebagai berikut:

“....Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum”

Dengan lahirnya UUBH paling tidak ada empat hal yang ingin dicapai oleh negara, yaitu:

1. Melalui UUBH negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
2. Melalui UUBH negara menjamin hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin terhadap bantuan hukum.
3. Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
4. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Lahirnya UUBH tidak lepas dari *political will* negara untuk mewujudkan persamaan perlakuan dihadapan hukum, khususnya bagi golongan yang tidak mampu, selain itu program bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan hukum Indonesia. Setiap manusia, baik mampu atau kurang mampu secara sosial ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan.⁴⁴

Bantuan hukum bukanlah diberikan negara karena belas kasihan. Dalam hubungannya dengan perjanjian masyarakat (*social contract*), bantuan hukum merupakan kewajiban yang diberikan negara guna melindungi hak-hak warga negara dan bantuan hukum merupakan alat dalam mewujudkan *rule of the law* serta pedang keadilan dalam memposisikan persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*).

Persoalan bantuan hukum penting dipahami secara utuh karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu.⁴⁵ Sekalipun UUD 1945

⁴³ Marc Galentar, *The Modernization of Law*, dalam Myron Weine (ed), *Modernization the Dynamics of Growth*, (New York: Basic Book, 1966), h. 167.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2004), h. 6.

⁴⁵ Bantuan hukum merupakan gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*).

tidak secara tegas menyatakan bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Berdasarkan UUD 1945, hak persamaan dihadapan hukum atau hak untuk mendapatkan akses keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan diimplementasikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Perlakuan yang sama dihadapan hukum juga berarti Warga Negara Indonesia harus dipandang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggungjawab melakukan hukum.

Demi terlaksananya persamaan hak dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan, bantuan hukum mutlak dilakukan, terlebih-lebih kepada masyarakat miskin yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, bahkan keadilan sebagaimana kehendak hukum juga sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan hukum. Dengan adanya program bantuan hukum akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi.⁴⁶

"Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya."⁴⁷

Pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diberlakukan sama di muka hukum (*aquality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).⁴⁸

Melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum,⁴⁹ dengan demikian bantuan hukum bagi orang miskin cukup masuk akal.⁵⁰ Bantuan hukum merupakan program untuk memperkuat masyarakat miskin agar dapat berdaya mengakses hak-hak dasarnya dalam mewujudkan keadilan.

Hak atas bantuan hukum bagi warga negara dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) dalam proses hukum juga tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9

⁴⁷ Soedarsono, *Kontroversi Atas Putusan Mahkamah konstitusi*, catatan Hakim Konstitusi Soedarsono, (Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 118.

⁴⁸ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, , 2009), h. 15.

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Bantuan Hukum...*, h. 9.

⁵⁰ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 474.

1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Terkait dengan proses hukum, bantuan hukum adalah sarana untuk terwujudnya masyarakat yang mampu mengakses keadilan, karena bantuan hukum sesungguhnya merupakan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum pada sila ke 5 Pancasila. Keadilan sosial diberi batasan dengan berpegang pada rumusan keadilan dari Aristoteles: "*virtus suum unus que tribuere*" yakni memberikan kepada seseorang sesuatu bagian apa yang menjadi haknya.⁵¹

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁵²

Bantuan hukum merupakan koreksi terhadap distribusi sumber daya hukum yang timpang antara orang-orang yang berada dan orang-orang yang tidak mempunya,⁵³ bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁵⁴ UUBH hadir untuk menciptakan persamaan di depan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi, dan secara filosofi, UUBH menitikberatkan pada kewajiban negara memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan titah konstitusi yang wajib dilaksanakan guna mewujudkan keadilan dan diberlakukan sama di muka hukum (*aquality before of the law*).

C. Pihak Yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum

Masalah akses untuk mendapatkan keadilan (*accses to justice*) bukanlah sekedar masalah yang terkait dengan bantuan hukum (*legal aid*) belaka. Hak untuk mendapatkan keadilan juga merupakan masalah politik bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya.⁵⁵

Bantuan hukum bukan sekedar untuk mewujudkan keadilan belaka atau sekedar gerakan amal untuk kemanusiaan, akan tetapi dalam tataran politik bantuan hukum merupakan wujud untuk menegakkan cita-cita negara hukum dan melaksanakan cita-cita negara demokrasi. Bantuan hukum bukan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.⁵⁶

⁵¹ Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun VI No. 64*, Januari 1991, h. 143.

⁵² Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico...*, h. 23.

⁵³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik...*, h. 475

⁵⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h.. 95-96.

⁵⁵ Gatot dan Virza Roy Hizzal (ed), *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, (Jakarta : LBH Jakarta, 2007), h. 3.

⁵⁶ Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, (Depok : Raih Asa Sukses, 2011), h. 144.

Bantuan hukum adalah salah satu cara untuk pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum di Indonesia.⁵⁷ Cara lain dalam melakukan pemerataan keadilan adalah melalui pemasyarakatan hukum (*law socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini,⁵⁸ pemasyarakatan hukum dapat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum.

Bantuan hukum dengan segala bentuknya merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).⁵⁹ Karena itu *legal aid* merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi masyarakat miskin dan marginal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh perguruan tinggi hukum yang telah memberikan bukti konkret terhadap warga negara yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, terdapat juga ribuan advokat yang menurut UUA diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu.

Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang miskin ditambah luas wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin masih jauh dari ideal. Secara kuantitatif saja, ratio antara advokat dan jumlah penduduk Indonesia masih sangat timpang. Untuk itulah Bantuan hukum mempunyai fungsi untuk membantu kepada orang yang membutuhkan dan mencari keadilan yang merasa haknya sebagai manusia diinjak-injak⁶⁰

Aktor utama pemberian layanan bantuan hukum adalah advokat. Sejarah mencatat advokatlah yang menjadi pioner untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin tersebut dikenal dengan konsep *probono public*. Advokat adalah profesi mulia (*officium nobile*), bukan profesi yang sekedar mengejar materi berlimpah semata, program bantuan hukum gratis harus melekat pada diri setiap advokat karena sejatinya bantuan hukum bukan sesuatu yang hina tetapi kegiatan mulia.

Melaksanakan bantuan hukum adalah pekerjaan mulia. Semulia profesi advokat itu sendiri. Karena memberi bantuan hukum juga *officium nobile*. Profesi apapun memerlukan keberpihakan kepada rakyat terutama rakyat yang terlemahkan.⁶¹ Keberpihakan kepada rakyat memang sangat penting karena itu merupakan bibit-bibit untuk melakukan perjuangan.⁶²

⁵⁷ Bambang Soenggono dan Aris Hariyanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 1.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012". Bandung, 19 Januari 2008, h. 3.

⁵⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 47-48.

⁶⁰ Mudakir Iskandar Syah, *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta : Grafindo Utama), h. 115.

⁶¹ Suara muhammadiyah, Edisi No. 2 Th ke 99, 16-31 Januari 2014, h. 9.

⁶² *Ibid*, h. 9.

PP Nomor: 42 Tahun 2013 menegaskan, pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat:

1. Berbadan hukum.⁶³
2. Terakreditasi.⁶⁴
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
4. Memiliki pengurus.
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan yang dilakukan advokat dalam setiap proses perkara, melainkan lebih jauh dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat mengerti terhadap hukum. Hal ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (*civics education*) kepada masyarakat.⁶⁵

Pemberian bantuan hukum secara litigasi hanya dapat dilakukan oleh advokat⁶⁶ yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum, sedangkan untuk Paralegal, Dosen dan Mahasiswa hukum hanya dapat memberikan bantuan hukum dalam bentuk nonlitigasi.

Untuk dapat memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk.
3. Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

⁶³ Bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.

⁶⁴ Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- f. telah menangani paring sedikit 10 (sepuluh) kasus.

⁶⁵ Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2002), h.182.

⁶⁶ Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paralegal dapat memberikan bantuan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemberi bantuan hukum.
 - b) Perguruan tinggi.
 - c) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum.
 - d) Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum.
3. Tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan bantuan hukum paralegal yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Bagi dosen agar dapat memberikan bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Berizajah sarjana di bidang hukum yang mengajar pada fakultas hukum atau fakultas syariah.

Sementara itu bagi mahasiswa agar dapat memberikan bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Merupakan mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
3. Telah lulus hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir.
4. Telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemberi bantuan hukum.
 - b) Perguruan tinggi.
 - c) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum.
 - d) Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum.

D. Penutup

Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan, dan pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun menunjukkan intensitas yang cukup tinggi.

Disamping memberdayakan hukum dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya sehingga keteraturan dan ketertiban dalam mewujudkan keadilan dapat tercapai.

Sifat pembelaan yang dilakukan melalui bantuan hukum secara cuma-cuma baik dalam perkara pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha negara tidak dilihat dari aspek harga diri, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan negara terhadap warga negara dalam ranah negara hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban yang diderita warga negara.

Dengan diterapkannya bantuan hukum, akan memberikan akses yang lebih luas kepada para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya secara *cost efficiency*. Disamping itu bantuan hukum juga akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk merugikan kepentingan hukum masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012". Bandung, 19 Januari 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bello, Petrus CKL., *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*, Insan Merdeka, Bogor, 2013.
- Daminan, Edy, *The Rule of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1970.
- Djohansjah J., *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.

- Fadjar A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.
- Friedman L.M., *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Galentar, Marc, *The Modernization of Law*, dalam Myron Weine (ed), *Modernization the Dynamics of Growth*, New York, Basic Book, 1966.
- Gatot dan Virza Roy Hizzal (ed), *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007.
- Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2010
- Ilyas, Karni, *Catatan Hukum*, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996.
- Kadaifi, Binziad, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2002.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses, Depok, 2011.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- MD., Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- MD ,Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1998.
- Mochtar, M. Akil, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara* Makalah Disampaikan Pada "Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)". Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Nitibaskara, TB. Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- Pantja, I. Gde Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- RI, Mahkamah Agung, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2004.
- Soedarsono, *Kontroversi Atas Putusan Mahkamah konstitusi, catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Soenggono, Bambang dan Aris Hariyanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Soeparman, H. Parman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Syah, Mudakir Iskandar, *Hukum dan Keadilan*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Winata, Frans Hendra, *Pro Bono Publico*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2009.

Jurnal/Majalah

- Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002.
- Suara muhammadiyah, Edisi No. 2 Th ke 99, 16-31 Januari 2014.
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun VI No. 64*, Januari 1991.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.